**BAB II**

1. **Tinjauan Tentang kerjasama Internasional**
2. **Tujuan kerjasama Ekonomi**

Kerjasama ekonomi antarnegara akan berlangsung dengan baik ketika pelaku kerja sama mempunyai prinsip yang disepakati bersama, yaitu, prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Pada dasarnya tujuan utama suatu negara melaksanakan kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain adalah untuk saling membantu dalam memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi serta untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Selain itu, kerja sama ekonomi antarnegara memiliki tujuan lain sebagai berikut:

1. Menambah Devisa Negara

Kegiatan perdagangan ekspor dapat menambah devisa suatu negara. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekspor barang atau jasa akan meningkatkan devisa suatu negara.

1. Memajukan dan Memperluas Perdagangan Negara

Kerja sama ekonomi antarnegara berpengaruh terhadap peningkatan perdagangan di semua aspek, terutama sektor perdagangan barang dan jasa.

1. Memperluas Lapangan Kerja.

Peningkatan kerja sama ekonomi antarnegara berpengaruh terhadap penambahan produksi dan pemasaran hasil produksi.keuntungan positif dari perluasan lapangan kerja antara lain penambahan tenaga kerja di unit-unit produksi sehingga akan memberikan akses yang lebihluas bagi penduduk atau masyarakat untuk memeperoleh kesempatan kerja. Dengan demikian, secara tidak langsung permasalah seperti jumlah pengangguran dapat teratasi.

1. Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri akan Barang dan Jasa

Dengan adanya kerja sama ekonomi, suatu negara dapat mendatangkan barang atau jasa melalui inpor barang yang belum mampu atau tidak diproduksi di negaranya sendiri. Selain itu, suatau negar dapat mengekspor barang yang belum mampu atau tidak diproduksi negara lain.

1. Mengurangi Kesenjangan antar Negara Maju dan Berkembang

Melalui kerjasama antarnegara, banyak negara-negara maju yang membantu negara yang sedang berkembang. Bentuk bantuan tersebut umumnya berupa dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, banyak negar-negara sedang berkembang mengekspor bahan-bahan mentah untuk kepentingan industrinya di negara-negara maju.

1. Menyeimbangkan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran suatu negara harus seimbang. Neraca pembayaran adalah suatu catatan tentang penerimaan uang dari luar negeri dan pembayaran ke luar negeri. Idealnya, penerimaan uang dari luar negeri harus lebih besar dari pada pembayaran ke luar negri. Oleh karena itu, agar neraca pembayaran menjadi surplus maka suatu negara umumnya menerapkan salah satu kebijakannya., yaitu, peningkatan ekspor barang atau jasa ke luar negeri dan mengurangi impor barang atau jasa dari luar negeri.

1. Melindungi Industri Dalam Negeri

Beberapa kebijakan yang diambil adalah pembatasan barang impor dan menaikan bea barang impor. Kebijakan ini mempermudah barang-barang impor yang dibutuhkan industri dalam negeri serta alih teknologinya. Kebijakan seperti ini disebut dengan kebijakan proteksi (perlindungan). [[1]](#footnote-1)

**2. Hambatan Kerjasama Ekonomi Internasional**

Dalam kegiatan perdagangan internasional(antar-negara) sering kali suatu negara mengalami hambatan. Hambatan perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.

Berikut ini beberapa hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional:

1. Perbedaan Mata Uang Antarnegara

Mata uang yang berlaku di setiap negara berbeda – beda. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.

1. Kualitas Sumber Daya yang Rendah

Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksi(produk) akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas produk rendah akan sulit bersaing dengan barang – barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.

1. Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar

Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarnya dilakukan secara tunai maka negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan resiko yang tinggi, seperti perampokan. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran secara tunai tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.

1. Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara

Setiap negara tentunya akan selalu melindungi hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin hasil produksinya tersaingi oleh hasil peoduksi dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor.

Apabila tarif impor tinggi maka produk impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada peoduk dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli produk impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.

1. Terjadinya Perang

Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. Hal ini dapat menyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.

1. Adanya Organisasi – Organisasi Ekonomi Regional

Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi – organisasi ekonomi. Tujuan organisasi – organisasi tersebut adalah untuk memajukan perekonomian negara – negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara – negara anggota saja. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. [[2]](#footnote-2)

**3. Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional**

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi yang terjadi antara dua negara, misalnya antara negara Indonesia dengan Jepang. Bentuk kerja sama ekonomi internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antarnegara. Contoh kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama antara indonesia dan korea selatan yang membentuk suatu kerja sama yang dikenal dengan Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC) yang menyelenggarakan pertemuan tahun 2007, kemudian tahun 2011 JTF-EC menjadi Working Level Task Force Meeting (WLTFM) yang dilaksanakan dibali.

1. Kerja Sama Ekonomi Regional

Kerja sama ekonomi regional adalah bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan antara negara yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Contoh lembaga kerja sama ekonomi regional adalah APEC, AFTA, dan ASEAN.

1. Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Kerja sama ekonomi multilateral adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu dengan bersifat internasional Contohnya IMF dan ILO

1. Kerja Sama Ekonomi Antarregional

Kerja sama ekonomi antarregional adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contoh kerja sama ekonomi antarregional adalah ASEAN dan Uni Eropa.

1. Kerja Sama Ekonomi Berdasarkan Tujuan dan Lapangan Usaha

Kerja sama ekonomi ini adalah tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, melainkan kerja sama yang dibentuk dengan dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OECD dan OPEC.[[3]](#footnote-3)

1. **Sejarah Kerjasama Bilateral Indonesia-Jepang**
2. **Sejarah Hubungan Bilateral**

Jepang dan Indonesia pada saat ini telah menjalin persahabatan sangat baik dan sangat erat yang berlandaskan hubungan kerjasama bilateral dean pertukaran diberbagai bidang termasuk ekonomi itu sendiri ada didalamnya, negara Indonesia termasuk negara yang banyak diekspor oleh Jepang dalam bidang otomotif termasuk kendaraan roda empat, Jepang termasuk negara pemasok yang sangat cukup besar dalam bidang otomotif di Indonesia.

Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007) Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin,perlengkapan listrik, dll.[[4]](#footnote-4)

Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil. Jepang memandang Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan memandan Indonesia cerah bagi pertumbuhan masa depan, Dengan alasan tersebut, Jepang tertarik membantu Indonesia untuk meningkatka kemakmuran, sementara itu Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumber daya alam yang besar. Disamping itu Jepang juga sangat berkepentingan menjaga pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan.

Jepang merupakan negara yang mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi negara pemimpin bangsa diasia secara ekonomi Jepang ingin memenangkan perang diasia timur untuk menjamin tersedianya bahan mentah untuk indusrti dan oprasi militernya. Namun pada kenyataanya, Jepang datang ke Indonesia hanya karena ingin menguasai kekayaan negara Indonesia sehingga Jepang menjajah Indonesia dengan sangat kejam. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun dan mengakibatkan penderitaan terhadap masyarakat Indonesia yang jauh lebih menderita dan sengsara daripada penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun. Dalam melakukan penjajahan, Jepang merekrut dan melatih pemuda-pemuda Indonesia untuk berlatih militer dan membentuk kesatuan militer yang beranggotakan para pemuda maupun pemudi Indonesia[[5]](#footnote-5)

Tidak hanya itu saja, Jepang menerapkan system ekonomi perang di Indonesia yang bertujuan untuk mengambil semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk kepentingan perangnya. Jepang mengarahkan sumber daya manusia untuk bekerja romusa yaitu system kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Jepang yang telah mempunyai citra buruk dimata Indonesia, akan tetapi Indonesia sadar bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Jepang itu memberikan dampak positif terhadap kehidupan bangsa Indonesia terutama secara militer dan mental dalam menghadapi kedatangan tentara sekutu dan tentara Belanda. Pada tahun 1950-an akhirnya kedua negara ini melakukan kerjasama bilateral.[[6]](#footnote-6)

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang dimulai sejak bulan April 1958 yaitu dengan adanya penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Indonesia, serta ditandatanganinya perjanjian perang yang mana ini sebagai bentuk penggantian kerugian yang diakibatkan oleh Jepang di Indonesia pada masa perang dahulu. Kemudian Indonesia membuat kantor perwakilan Indonesia di Tokyo dan dilanjutkan dengan penempatan konsulat jendral sebagai langkah awal untuk mempermudah melakukan perundingan mengenai pemampasan perang tersebut. Tidak hanya itu saja, sejak tahun 1958 kedua negara banyak melakukan penandatanganan atau persetujuan serta pertukaran nota yang isinya adalah mengatur masalah kerjasama dibidang ekonomi, bidang pertanian, bidang kehutanan, peningkatan produksi pangan, bidang sosial, dan budaya. Hubungan yang demikian lama terjalin ini menyebabkan hubungan keduanya menjadi sangat kompleks Pada bulan juli 2003 Indonesia sepakat menjalin hubungan bilateral dengan Jepang dan kemungkinan berkerjasama dalam bidang ekonomi, Bagi Indonesia, kerjasama internasional ini (bilateral) merupakan pengalaman pertama ikut terjun dalam kancah perundingan perdagangan internasional dalam forum bilateral.

Jepang adalah partner dagang Indonesia yang utama, dimana Jepang saat ini merupakan ranking pertama dari sasaran pasar ekspor Indonesia. Di samping itu Jepang juga negara dengan investasi yang cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang dan Indonesia berusaha membangun kembali hubungan diplomatiknya dan meyakinkan rakyat Indonesia atas misi persahabatan antara keduanya. Dan 50 tahun dari hubungan bilateral antara keduanya ini dinilai sebagai titik ordinat baru untuk membina hubungan lebih baik. Pada tahun 1985 Indonesia dengan Jepang telah memulai hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral diberbagai bidang. Dibidang perdagangan, kerjasama kedua negara ini dikokohkan dengan perjanjiann Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diberlakukan sejak 1 Juli 2008. IJEPA memberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan Ekspor Impor Jepang Indonesia dengan tarif rendah. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan antara Jepang dan Indonesia.

Di era kekinian, Jepang merupakan salah satu Negara yang dikategorikan sebagai Negara superpower dunia. Bagaimana tidak, dengan kekuatan ekonomi yang tinggi, potensi militer yang dimiliki serta aliansi yang diboncengi oleh Amerika Serikat membuat posisinya semakin kuat. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya mendorong Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam konteks diplomasi dan kerjasama bilateralnya, meskipun terdapat sensifitas pribadi yang menodai sejarah antara kedua Negara tersebut. Hubungan Bilateral kedua negara dibuka pada bulan 20 Januari 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Komitmen yang dimiliki atas hubungan bilateral ini tentunya adalah persahabatan, kemajuan Negara dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dengan kemampuan diplomasi, kekuatan ekonomi, potensi militer yang dimilikinya serta keeratan aliansi dengan Amerika Serikat, Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia yang senantiasa diperhitungkan dalam menentukan strategi politik, keamanan maupun ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang kehidupan, baik untuk program pembangunan nasional maupun keikutsertaannya dalam menjaga ketertiban dunia sesuai Pembukaan UUD 1945 melalui berbagai kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Dalam suasana berkembangnya gejala disintegrasi bangsa dalam beberapa tahun terakhir ini, Jepang memberikan komitmen dan dukungan terbaiknya kepada Indonesia dalam ikut menjaga dan memelihara keutuhan integritas teritorial dan kesatuan wilayah negara RI. Meskipun demikian, Jepang juga merasa prihatin dan berharap banyak kepada Indonesia agar dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan di dalam negerinya secepat mungkin dengan baik, terutama dalam masalah Aceh dan Irian Jaya, dengan sepenuhnya memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia.

Sejak bergulirnya proses reformasi dan demokratisasi, Indonesia merasakan Jepang menunjukkan keinginan untuk membantu pulihnya stabilitas politik dan bergeraknya kembali roda perekonomian Indonesia. Dalam kaitan ini juga Indonesia menghargai komitmen dan dukungan Jepang dalam ikut menjaga dan memelihara keutuhan integritas teritorial dan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dari segala bentuk gejala disintegrasi bangsa.[[7]](#footnote-7)

1. **Bentuk-bentuk Kerjasama Indonesia-Jepang**

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Di bidang politik telah terjalin beberapa perjanjian yakni Persetujuan Indonesia – Jepang tersebut antara lain meliputi, pertama, “Treatyof Amity and Commerce” yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo. Kedua, “Perjanjian Hubungan Udara” yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 1962 di Tokyo. Ketiga, “Kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1981 di Jakarta. Keempat, “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda” yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1982 di Tokyo. Sejak tahun 1966 sampai sekarang antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah dilakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan Jepang. Antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi/forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM.

Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF. Dan meskipun dalam suasana krisis Jepang tetap memandang Indonesia sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama bilateral dalam rangka sister city/province saat ini juga semakin berkembang. Saat ini terdapat 6 sister city/province arrangements yang telah dikukuhkan dengan MOU yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-Ichikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture dan Irian Jaya-YamagataPrefecture. Bentuk kerjasama lain yang turut membantu pengembangan hubungan adalah keberadaan asosiasi-asosiasi persahabatan Indonesia – Jepang di berbagai prefektur di Jepang seperti Hiroshima, Kyushu, Okinawa, Ichikawa, maupun Tochigi.

Pentingnya hubungan Indonesia – Jepang juga tercermin dari besarnya perwakilan kedua negara di Tokyo dan Jakarta. Kedutaan besar Jepang di Jakarta termasuk perwakilan Jepang terbesar di negara lain, demikian juga halnya dengan KBRI Tokyo yang merupakan salah satu KBRI yang terbesar. Dan ini berlanjut pada kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jepang pada November 2006 lalu. Dan keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan dalam program “Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” .

Di bidang ekonomi, keduanya juga memiliki hubungan yang sangat erat. Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor dan sebagai sumber impor dengan total nilai perdagangan sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar US$30 milyar meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2006 senilai US$ 27 milyar. Pada periode 2007, Indonesia mendapatkan surplus US$17 milyar. Sementara itu untuk tahun 2008 periode Januari-September, nilai perdagangan Indonesia-Jepang senilai US$ 32,8 milyar, dengan ekspor Indonesia senilai US$ 21,8 milyar, impor Indonesia senilai US$ 11 milyar dan Indonesia mendapatkan surplus sebesar US$ 10,87 milyar. Produk-produk ekspor Indonesia antara lain: minyak dan gas bumi serta produk non-migas seperti kayu lapis, mesin-mesin listrik, nikel, hasil perikanan, karet alam, kertas dan produk kertas, tekstil dan produk tekstil, furniture, kopi, cokelat, teh dan lainnya. Sedangkan produk impor utama dari Jepang ke Indonesia di antaranya adalah barang modal yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan kebutuhan industri dalam negeri seperti mesin-mesin, perlengkapan elektronik, suku cadang kendaraan, besi baja, plastik, bahan kimia, dan produk metal .

Saat ini, bentuk kerjasama yang sedang dikembangkan antara keduanya ialah JIEPA, yakni Japan Indonesian Economic Partnership Agreement. Dalam perjanjian ini diatur tentang pembebasan tariff ekspor impor antara kedua Negara. Perjenjian ini membawa manfaat yang luar biasa. Pada 1 Juli 2008, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement/JIEPA) diberlakukan. Perjanjian itu ditandatangani Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Abe, Agustus tahun lalu. Peristiwa ini menjadi istimewa karena tahun ini kedua negara memperingati 50 tahun hubungan diplomatik. Inti perjanjian itu memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui liberalisasi perdagangan dan investasi lebih luas untuk menuju kesejahteraan wilayah Asia. Diharapkan, perjanjian ini mendorong integrasi ekonomi Asia Timur di masa depan. Makna utama EPA adalah manfaat langsung perdagangan. Ihwal pembebasan tarif, secara keseluruhan mencapai sekitar 92 persen. Pembebasan tarif berlaku bagi produk industri mineral dari yang diekspor Indonesia ke Jepang, menyusul produk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Diharapkan, kelak perdagangan kedua negara meningkat. Dampak pelaksanaan EPA tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga mendorong kemitraan strategis antarperusahaan kedua negara dan substansi ekspor Indonesia ke Jepang akan kian beragam, termasuk yang bernilai tambah tinggi. Penghapusan tarif industri tekstil Indonesia akan menambah daya saing di pasar Jepang. Juga diharapkan akan lebih banyak masuk ke Jepang ragam tekstil bernilai tambah tinggi. Untuk industri otomotif, komponen dan bahan dari Jepang akan lebih murah sehingga biaya produksi di Indonesia menurun. Indonesia menjadi basis produksi otomotif dan membuka peluang ekspansi ekspor ke ASEAN dan Timur Tengah. Dan bantuan ekonomi Jepang bagi Indonesia dalam bentuk Pinjaman Official Development Assistance (ODA), Dana Hibah dan Bantuan Teknik juga merupakan sokongan pembangunan yang sangat bermanfaat bagi Indonesia.

Di bidang lain seperti lingkungan, pendidikan dan sosial budaya, kerjasama antara dua Negara ini juga diberlakukan. Dalam bidang lingkungan hidup terdapat perjanjian Protokol Kyoto dan kebijakan Cool Earth Partnership, Jepang telah mengalokasikan dana bantuan sebesar US$10 milyar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi rumah kaca dan mengurangi dampak negatif akibat perubahan iklim. Dan dalam hubungan sosial budaya antara Indonesia dan Jepang telah terjalin dengan baik sejak lama. Untuk mewadahi jalinan hubungan kerjasama yang lebih baik, telah dibentuk beberapa lembaga persahabatan Jepang dan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah: Japan – Indonesia Association (Japinda), Organization Council Japan-Indonesia Friendship (Nihon-Indonesia Yukodantai Kyogikai), Tokyo Lagu-Lagu kai, Tanah Air kai, Merah Putih kai, Yayasan Gesang, Teman Sejati kai, Hokaido-Indonesia kai, Hiroshima-Indonesia kai, Kyoto-Indonesia Yuko Kyokai, Kansai-Indonesia Yuko Kyokai, Okinawa-Indonesia Yuko Kyokai, Nagasaki-Indonesia Yuko Kyokai, Kyushu-IndonesiaYuko Kyokai, dan Garuda Kumamoto kai. Sementara itu, di Indonesia juga terdapat banyak lembaga persahabatan antara lain, Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ), dan Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA). Dan di bidang periwisata serta pendidikan pun Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang sangat erat.[[8]](#footnote-8)

1. **Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Bilateral Jepang dan Indonesia**

Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Bagi Indonesia dapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa, peningkatan investasi Jepang diIndonesia, serta bantuan luar negri terbesar. Sedangkan bagi Jepang, berkepentingan memperluas akses pasar bagi produknya serta mempererat hubungan kerjasama dan saling ketergantungan.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pengalaman Indonesia yang pernah menjadi jajahan negara Jepang, namun beberapa usaha Jepang dalam memberikan bantuan kepada Indonesia telah berhasil memperbaiki lagi hubungan Indonesia dengan Jepang. Kehadiran doktrin fukuda yang memperlihatkan betapa Jepang ingin menjadi negara yang bersahabat juga memiliki peran penting dalam hal ini. Hubungan Indonesia dengan Jepang telah memberikan peran yang positif, kerjasama yang yang dilakukan diantaranya telah memberikan sumbangan bagi pembangunan Indonesia, Indonesia berperan sebagai supplier bahan mentah bagi Jepang, sementara Jepang yag akan mengolah bahan tersebut untuk dijadikan komoditi yang lebih bernilai, selain itu Jepang juga berperan memberikan bantuan berupa investasi modal, pinjaman luar nrgri dan bantuan lainnya. Selain itu, hubungan yang harmonis dengan Jepang telah membantu terwujudnya stabilitas dan perdamaian ditingkat regional yang juga akan menciptakan iklim kondusif untuk melakukan pembangunan dan kerjasama.[[9]](#footnote-9)

Di sisi investasi, peran Jepang dalam perekonomian Indonesia tidak kalah penting. Walaupun sempat mengalami penurunan kuantitas investasi saat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia di tahun 1997, Jepang masih menjadi salah satu negara terpenting di antara negara-negara lain yang melakukan investasi di Indonesia. Sejak tahun 1967 hingga 2007, jumlah penanaman modal langsung Jepang di Indonesia menempati peringkat pertama di Indonesia dengan angka 11,5% secara keseluruhan. Banyak perusahaan Jepang yang membuka cabang dan beroperasi di Indonesia. Saat ini terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Hal ini tentu memberikan kontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia karena keberadaan perusahaan Jepang di Indonesia tentu membuka kesempatan kerja yang luas bagi sumber daya manusia dalam negeri. Lebih lanjut, berdasarkan kutipan yang didapat dari BPKM, perusahaan-perusahaan Jepang mempekerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia. Ini menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia.

Tidak hanya itu, Jepang juga turut memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kaitan historis dengan Indonesia, Jepang telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah. Jepang mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara penerima ODA/Official Development Assistance (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US$1.22 milyar, yaitu + 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang), berdasarkan data dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

Lebih lanjut, mengingat pentingnya peran Jepang dalam perekonomian domestik, memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk forum Investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia. Selain itu, untuk semakin meningkatkan kerjasama ekonomi antara Jepang dan Indonesia, Economic Partnership Agreement (EPA) resmi disetujui Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe pada tanggal 20 Agustus 2007. Pemberlakuan EPA yang mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan semakin meningkatkan peningkatan perdagangan dan investasi antara kedua negara yang tentunya akan menuai banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia.

1. **Kerjasama Indonesia dan Jepang Melalui IJEPA**
2. **Tinjauan Umum IJEPA**

Jepang memandang Asia adalah sebagai pasar yang signifikan dan luas dengan prospek cerah bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak negara di wilayah tersebut telah berhasil melakukan transisi dari substitusi impor ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu mengatasi krisis moneter tahun 1997‐1998. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar ke‐4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia mewakili pasar asing yang potensial apabila pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dapat terwujud. Dengan alasan tersebut, Jepang tertarik membantu Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran, sementara itu Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumber daya ala yang besar. Disamping itu Jepang juga sangat berkepentingan menjaga pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan. Sejak pertengahan tahun 1970‐an, Indonesia telah menjadi pemasok terbesar gas alam ke Jepang. Pada periode tersebut, Jepang telah membeli 50%‐70% ekspor LNG Indonesia dan sisanya ke pasar LNG dunia. Dua fasilitas pengolahan LNG utama Indonesia yaitu Arun di Lhokseumawe Provinsi NAD dan Badak di Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dimana keduanya dibangun pada pertengahan 1970‐an di bawah kontrak untuk pasokan ke Jepang. [[10]](#footnote-10)

Dalam politik ekonomi internasional terdapat beberapa persoalan penting yaitu hubungan yang tepat antara politik dan ekonomi, pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga dan sifat luasnya globalisasi ekonegara maju dengan negara dunia ketiga. Dalam hal ini masalah disparitas antara negara maju dengan negara dunia ketiga menjadi agenda ekonomi politik internasional semakin penting. Dalam konteks tersebut kemudian liberalism ekonomi yang di implementasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun dengan negara maju menjadi formula bagi negara berkembang dalam peningkatan kapabilitas perekonomian.

Negara berkembang yang sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi seperti Amerika Latin dan sebagian negara berkembang lainnya saat ini seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan sedang mencoba menjalankan standar ekonomi nasionalnya seperti negara maju.

Indonesia saat ini, secara ekonomi termasuk ke dalam negara dunia ketiga atau negara berkembang yang sedang mencoba untuk menjajarkan diri dengan negara-negara lain yang lebih maju. Salah satunya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam bentuk IJEPA.[[11]](#footnote-11)

Bagi Indonesia, kerjasama internasional ini (*bilateral*) merupakan pengalaman pertama ikut terjun dalam kancah perundingan perdagangan internasional dalam forum bilateral. Jepang adalah partner dagang Indonesia yang utama, dimana Jepang saat ini merupakan ranking pertama dari sasaran pasar ekspor Indonesia. Di samping itu Jepang juga negara dengan investasi yang cukup tinggi di Indonesia. Diharapkan dengan kerjasama ini volume perdagangan dan investasi Jepang bisa meningkat.[[12]](#footnote-12)

Sinyal kerjasama kedua negara diberikan oleh kedua kepala negara, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dan perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi yang menyatakan pentingnya EPA bagi pengembangan ekonomi kedua negara dalam forum APEC  *Summit Meeting* di Chile. Pada bulan Juni 2003, Jepang dan Indonesia sepakat menggali lebih dalam kemungkinan kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Kedua pihak kemudian membentuk *Joint Study Group* yang membahas bentuk dan masa depan kerjasama bilateral tersebut. Pada awal tahun 2005, *Joint Study Group* ini mengadakan tiga kali rapat untuk memutuskan layak tidaknya dilaksanakan FTA antara kedua Negara serta memutuskan kapan dimulainya proses negosiasi. Pada tanggal 2 Juni 2005, dalam kunjungannya ke Tokyo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dimulainya negosiasi *Free Trade Agreement* (*FTA*) dengan kerangka *Indonesia­Japan Economic Partnership Agreement* (*IJEPA*). Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kerjasama dengan Jepang bagi Indonesia.

Berbagai perundingan dan *intersesion meeting* kemudian dilaksanakan antara bulan Juli 2005 sampai dengan Juni 2007. Proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat IJEPA ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh kedua kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia. Dalam rangka implementasi IJEPA masing‐masing pihak telah selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur pendukungnya, yang pada akhirnya implementasi dari IJEPA tersebut juga telah disepakati untuk dimulai (*entry to force*) pada tanggal 1 Juli 2008. [[13]](#footnote-13)

1. **IJEPA Selangkah Lebih Awal Dari Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang**

IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) adalah sebuah kesepakatan yang disepakati antara Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. Actor yang dilibatkan bukan hanya pemerintah tetapi juga para pengusaha baik dari Indonesia maupun Jepang sepakat untuk menjalin kerjasama melalui IJEPA, karena kedua negara menganggap isu saat iniadalah isu yang sama pentingnya dengan militer dimana masalalu merupakan isu dominan dalam Hubungan Internasional. Para pengusaha Indonesia dan Jepang sebagai actor non-negara dengan aktifitas perdagangan internasional telah semakin mendorong pemerintah kedua negara untuk memutuskan bekerjasama melalui IJEPA.

Pada umumnya kepentingan kedua negara ini di bidang perdagangan dan investasi adalah saling melengkapi dan tidak saling bersaing. IJEPA merupakan FTA (Free Trade Area) atau perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Jepang dengan Indonesia. FTA bilateral ini merupakan pengalaman pertama bagi pihak Indonesia namun tidak bagi Jepang yang sudah berpengalaman dalam melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa negara yaitu antara lain dengan Singapura, Malaysia, dan Meksiko serta masih dalam perundingan dengan Korea Selatan, Thailand, dan Fillipina. Perjanjian bilateral pada umumnya hanya mencangkup dalam bidang perdagangan berupa liberalisasi perdagangan (FTA), akan tetapi perjanjian juga dapat dibuat lebih luas lagi mencangkup bidang-bidang lain yang merupakan keinginan dari kedua belah pihakdan di sepakati oleh kedua belah pihak.

Khusus perjanjian bilateral dengan pihak Jepang ini jumlah cangkupan isu atau elemen yang di janjikan antara Indonesia dengan jepang lebih banyak dari yang ditentukan dalam WTO, sehingga perjanjian ini bias juga dikategorikan sebagai perjanjian FTA plus (FTA++). Perjanjian FTA yang telah dilakukan pihak Indonesia selama ini masih dalam kerangka regional yaitu ASEAN-Cina, ASEAN –Korea. Perjanjian tersebut kebanyakan hanya berupa pembatasan tariff bea masuk antar negara dengan persyaratan sesuai dengan perjanjian WTO. Dimana setiap negara diwajibkan menurunkan tarif impornya menjadi 0% dalam jangka waktu tertentu dan mencangkup sejumlah *Tariff Line,*dan umumnya lebih dari 90% jumlah tariff line yang ada.

Perjanjian kerjasama ekonomi IJEPA ini membuat hubungan yang terjalin diantara Indonesia-Jepang semakin tidak dapat dilepaskan. Dalam kerangka yang sudah di sepakati didalam perjanjian inimembuat keduanya semakin dimudahkan dalam melakukan kegiatan perdagangan antara yang satu dengan yang lain.[[14]](#footnote-14)

1. **Manfaat Kerjasama Ekonomi IJEPA**

Dengan adanya perjajian kerjasama IJEPA Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat antara lain:

* Kerjama ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu Jepang dan Indonesia,
* Manfaat yang dapat di peroleh dari kerjasama ini, yaitu peningkatan di bidang perdagangan(khususnya barang dan jasa), peningkatan di investasi dan bisnis dan peningkatan kapasitas bagi Indonesia,
* Elemen EPA yang menguntungkan bagi Indonesia, yaitu peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang, kerjasama peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing Indonesia, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang optimal bagi Indonesia serta keuntungan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama ini sejalan dengan era reformasi Indonesia yang strategi offensive dalam meraih pasar untuk produk-produk unggulan dalam negeri serta meningkatkan investasi asing dan setrategi diffensif untuk melindungi ketidaksiapan pengusaha-pengusaha menengah kebawah,
* IJEPA akan membantu Indonesia dengan reformasi yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan atau memperbaiki kualitas bea cukai, administrasi perpajakan dan terciptanya kepastian hokum sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang baik di Indonesia.[[15]](#footnote-15)

1. <http://apolo.or.id/index.php/8-artikel-publik/27-kerjasama-ekonomi-antara-negara-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-indonesia> (diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://dewimayasari.wordpress.com/2011/04/23/hambatan-perdagangan-internasionalantar-negara/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.artikelsiana.com/2015/03/Manfaat-Bentuk-Kerja-Ekonomi-Internasional.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 15.30 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.mofa.go.jp/english/mf_refiew/361_03.html> diakses pada 25 Februari 2016 pukul 23:00 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. www.research.mercubuana.ac.Id/in dustri\_otomotif\_ Indonesia, diakses 27 Maret 2016 pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. http://politik. kompas iana.com/2012/04/04/hubungan-diplomatik-antara-Indonesia-dan-Jepang-dalam perspektif-teori-multi-track-diplomacy-452468.html , diakses pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. [http://www.kartikagaby.woedpress.com](http://www.kartikagaby.woedpress.com/) diakses pada tanggal 12 april 2016 pukul 22.30 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. Loc.Cit [↑](#footnote-ref-8)
9. http://www.slideshare.net/genokg agah/k-30117551hubungan bilateral Indonesia-Jepang diakses pada 20 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-9)
10. Achdiat Atmawinata,Op.Cit., hlm. 28. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://edimirantojelajahpena.wordpess.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Achdiat Atmawinata,Op.Cit., hlm.28 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., hal. 29 [↑](#footnote-ref-13)
14. Indah Citra Rizki, “Efektifitas Implementasi IJEPA Terhadap Nilai Perdagangan dan Investasi Indonesia”, skripsi Fakultas Ekonomi UNPAR, 2012, hal 70-72 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hal 78-79 [↑](#footnote-ref-15)